

Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat

Angelica Valentina

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung,
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: Angelicavalentine50@gmail.com

Abstract: Corruption is a major issue hindering the development of society and the economy in Indonesia. This study discusses the key steps in preventing corruption by emphasizing the importance of building integrity and transparency within the community. Through interviews with various individuals, insights were gained regarding public perceptions of corruption and the measures that can be taken to mitigate it. The findings indicate that education, the instillation of honesty values, and active community participation are crucial in creating an environment free from corruption. This research aims to contribute to the efforts in combating corruption in Indonesia.

Keywords: Corruption, prevention, integrity, transparency, community.

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat perkembangan masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini membahas langkah-langkah utama dalam pencegahan korupsi dengan menekankan pentingnya membangun integritas dan transparansi dalam masyarakat. Melalui wawancara dengan berbagai individu, diperoleh pemahaman mengenai persepsi masyarakat tentang korupsi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguranginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, penanaman nilai-nilai kejujuran, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, pencegahan, integritas, transparansi, masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah pemerintahan, institusi, hingga dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan korupsi sering kali dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun, dalam kenyataannya, korupsi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil, yang sering kali dianggap sepele, tetapi dapat berdampak besar pada integritas dan transparansi di masyarakat.

Wawancara dengan beberapa individu di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa tindakan korupsi sering kali dimulai dari hal-hal yang tampaknya sepele, seperti manipulasi kecil dalam laporan keuangan, ketidakjujuran dalam pengadaan barang, atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Fenomena ini mencerminkan adanya budaya toleransi terhadap tindakan korupsi yang berkembang di masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menciptakan lingkungan yang kurang transparan.

Dalam konteks global, berbagai negara telah berhasil menerapkan sistem yang efektif dalam pencegahan korupsi dan membangun integritas serta transparansi di masyarakat. Misalnya, Singapura terkenal dengan kebijakan anti-korupsinya yang ketat. Melalui lembaga seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura telah menunjukkan bahwa kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan pendidikan publik dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Selain itu, akses terbuka pada informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol tindakan pemerintah, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Swedia juga merupakan contoh negara yang berhasil memerangi korupsi dengan menerapkan prinsip transparansi. Undang-undang akses informasi di Swedia memberikan hak kepada publik untuk mengakses dokumen pemerintah, sehingga mempermudah pengawasan. Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap institusi, Swedia berhasil menciptakan lingkungan di mana korupsi sangat diminimalisir.

Sementara itu, Korea Selatan telah melakukan reformasi besar-besaran setelah terjadinya beberapa skandal besar yang melibatkan pejabat publik. Melalui undang-undang yang lebih ketat dan perlindungan bagi pelapor korupsi, Korea Selatan telah memperlihatkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam melawan korupsi dapat mendorong perubahan positif. Penggunaan teknologi untuk transparansi juga menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh negara ini.

Dengan melihat contoh-contoh positif dari negara-negara tersebut, dapat dipahami bahwa untuk mengatasi korupsi di Indonesia, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Mengadaptasi praktik terbaik dari negara-negara lain, sambil tetap memperhatikan konteks lokal, menjadi kunci untuk membangun integritas dan transparansi dalam masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan korupsi tidak hanya dapat mencegah tindakan korupsi di tingkat tinggi, tetapi juga dapat mendorong perilaku jujur di tingkat masyarakat.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah utama yang akan dibahas dalam artikel yaitu "**Bagaimana Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi: Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat?**".

3. METODE PENELITIAN

Artikel "Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi: Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat" menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan empat metode: wawancara mendalam, studi kepustakaan, observasi partisipatif, dan analisis deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan dengan individu dari berbagai latar belakang untuk memahami persepsi dan pengalaman mereka tentang korupsi. Studi kepustakaan melibatkan peninjauan literatur akademik tentang korupsi, integritas, dan transparansi. Metode observasi partisipatif mengamati interaksi sehari-hari untuk mengidentifikasi potensi kasus korupsi. Terakhir, analisis deskriptif menganalisis data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi untuk memahami pola perilaku dan pengalaman terkait korupsi. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi pencegahan korupsi, dengan fokus pada tingkat keluarga dan masyarakat.

4. PEMBAHASAN

Memahami Korupsi dan Akar Penyebabnya

Korupsi sering kali diartikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan, kita bisa melihat bahwa masyarakat mengidentifikasi bentuk korupsi dalam tindakan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga, "Korupsi bagi ibu tuh suatu tindakan yang nggak jujur, apapun itu, perihal sikap atau pun materi." Hal ini memperjelas bahwa pemahaman masyarakat terhadap korupsi tidak hanya terbatas pada skandal besar, tetapi juga mencakup tindakan kecil yang mungkin diabaikan, seperti membulatkan harga dalam transaksi atau melebihi permintaan uang.

Dalam sebuah wawancara yang mendalam, seorang ibu menjelaskan pandangannya tentang korupsi dan langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil untuk meminimalisir tindakan tidak jujur di lingkungan sekitar. Menurut ibu, korupsi adalah "suatu tindakan yang tidak jujur, apapun itu, baik dalam sikap maupun materi." Dari penjelasan ini, tampak jelas bahwa ia mengartikan tindakan tidak jujur, sekecil apa pun, sebagai bentuk korupsi. Pandangannya mencerminkan sikap masyarakat umum yang cenderung melihat korupsi bukan hanya dalam skala besar, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari antarindividu.

Ketika ditanya tentang cara untuk mencegah korupsi, ibu tersebut menyatakan, "Menurut saya, cara mencegahnya harus menanamkan sikap jujur dari dalam diri dulu. Misalnya, jika belanja totalnya 4.500, ya itu 4.500, jangan beralih-alih ingin dikenakan jadi 5.000. Walaupun cuma 500 perak, itu tetap sama saja korupsi." Pandangan ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam tindakan sehari-hari, seperti dalam transaksi jual beli. Bahkan dalam jumlah kecil, tindakan penggenapan nilai belanja dianggap sebagai bentuk korupsi yang harus dihindari.

Ibu tersebut juga memberikan contoh konkret mengenai korupsi yang paling sering terjadi di sekitarnya. Ia mengatakan, "Gak usah jauh-jauh, lihat saja anak-anak zaman sekarang. Ketika minta uang untuk buku, baju, dan lain-lain, pasti bohong, bisa lebih 10.000 atau 15.000. Itu saja sudah termasuk korupsi ke ibu sendiri." Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi dapat muncul bahkan dalam interaksi sederhana antara anak dan orang tua. Permintaan uang yang melebihi kebutuhan yang sebenarnya juga dipandang sebagai tindakan korupsi kecil yang penting untuk diperhatikan.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia juga mengisahkan pengalaman pribadinya terkait tindakan korupsi. "Pernah, tapi tidak yang harus dipikirkan serius. Paling tidak jauh-jauh dari belanja di supermarket yang totalnya dibulatkan, seperti yang tadi saya katakan. Atau dari keluarga sendiri, saya lihat anak suka melebih-lebihkan uang bayaran, tetapi saya selalu bilang ke anak, lebih baik jujur tentang berapa bayaran yang sebenarnya," ujarnya. Dialog ini menegaskan bahwa korupsi bisa terjadi dalam lingkup keluarga melalui tindakan kecil yang tampaknya sepele, tetapi penting untuk dihindari demi membangun integritas.

Berdasarkan wawancara ini, judul "Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi: Membangun Integritas dan Transparansi di Masyarakat" dipilih. Judul ini mencerminkan urgensi membangun sikap jujur dan transparan, dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan masyarakat sekitar. Pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan kebijakan besar, tetapi juga penanaman nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menanamkan sikap ini sejak dini, diharapkan masyarakat dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. (Wawancara dengan ibu rumah tangga, 2024)

Pandangan ini konsisten dengan kajian yang dilakukan oleh Zainudin Hasan dalam berbagai studinya, yang menunjukkan bahwa korupsi sering kali dimulai dari pelanggaran etika kecil yang lama-kelamaan dapat merusak integritas individu dan akhirnya berdampak besar pada masyarakat

. Dengan demikian, penting untuk mengenali akar penyebab korupsi di tingkat individu, karena hal ini akan berdampak pada pencegahan yang lebih luas di tingkat sistemik.(Zainudin Hasan,2023).

pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan regulasi yang ketat, tetapi juga perubahan fundamental dalam budaya dan etika masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam teori *Institutional Anomie* oleh Robert Merton, korupsi sering kali tumbuh di masyarakat di mana norma sosial lemah dan dorongan materialistik mendominasi. Ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana seringkali praktik-praktik koruptif diabaikan atau dilihat sebagai hal yang lumrah jika jumlahnya kecil.

Teori *Social Learning* dari Edwin Sutherland juga menjelaskan bagaimana korupsi dapat dipelajari melalui interaksi sosial, terutama ketika individu terpapar oleh lingkungan yang membenarkan atau memaafkan tindakan tidak etis.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan

Pencegahan korupsi di Indonesia dijalankan melalui berbagai undang-undang dan institusi seperti *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK). Hasan dalam salah satu artikelnya menyoroti pentingnya peran institusi hukum dalam memerangi korupsi di tingkat nasional dan daerah. Namun, meski sudah ada kerangka hukum yang kuat, korupsi tetap merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Studi Hasan di Lampung, misalnya, menyoroti adanya pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tanah sporadik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan transparansi.

Di Indonesia, regulasi hukum untuk pencegahan korupsi telah berkembang pesat, mencakup berbagai undang-undang yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dan institusi dalam konteks korupsi. Salah satu undang-undang yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menetapkan definisi korupsi, sanksi bagi pelanggar, dan prosedur penyidikan serta penuntutan yang diatur secara ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .

Peran KPK dalam Penegakan Hukum

KPK dibentuk pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk memberantas korupsi di semua sektor. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi, dan juga bertugas dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi . Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) menunjukkan bahwa KPK telah berhasil menindak banyak

kasus korupsi besar, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam hal independensi dan pengawasan publik.(Zainudin Hasan,2022).

Regulasi Pendukung

Selain UU No. 31/1999, terdapat beberapa regulasi lain yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

1. **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
2. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah .
3. **Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, yang mengharuskan penyelenggara layanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat .

Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun ada berbagai regulasi, tantangan besar dalam implementasi hukum tetap ada. Masih banyak kasus korupsi yang tidak terungkap, dan banyak individu yang merasa kebal hukum karena kekuasaan atau posisi mereka. Sebagai solusi, penting untuk memperkuat kolaborasi antara KPK dan lembaga lain, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah dan komunitas .

Studi oleh Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi sejak dini dapat membentuk karakter anak-anak untuk lebih jujur dan berintegritas di masa depan . Dengan demikian, regulasi hukum yang kuat harus diimbangi dengan budaya anti-korupsi yang dimulai dari pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Faktor Budaya dan Sosial dalam Korupsi

Korupsi di Indonesia sering kali dibentuk oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, dalam wawancara, seorang ibu menggambarkan bahwa perilaku korupsi dapat terjadi sejak usia muda, bahkan dalam keluarga. “Anak-anak jaman sekarang kalo minta uang buku atau baju pasti bohong kek bisa lebih 10.000 atau 15.000 itu aja udah termasuk korupsi ke ibunya sendiri,” katanya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan korup dapat dimulai dari rumah dan terus berkembang jika tidak segera dicegah. Pentingnya faktor sosial dan budaya dalam pencegahan korupsi. bahwa tanpa ada perubahan budaya, upaya pencegahan korupsi tidak akan efektif, meskipun ada kebijakan hukum yang kuat.

Pendidikan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Pendidikan adalah kunci untuk mencegah korupsi di masa depan. Dalam wawancara, ditekankan bahwa menanamkan sikap jujur sejak kecil, seperti dalam transaksi sehari-hari, sangat penting. Ibu rumah tangga yang diwawancarai memberikan contoh, “Kalau misalkan belanja apapun itu kalau totalnya 4.500 ya 4.500 jangan beralih-alih ingin dikenakan jadi 5.000.” Ini adalah langkah kecil yang dapat membentuk karakter jujur pada anak-anak.(Zainudin Hasan,2021). Salah satu langkah penting dalam mencegah korupsi adalah pendidikan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kurikulum sekolah. sekolah-sekolah mengintegrasikan mata pelajaran yang mengajarkan tentang integritas, kejujuran, dan transparansi, sehingga generasi muda tumbuh dengan kesadaran tinggi akan pentingnya antikorupsi.

Studi Kasus: Kasus Korupsi E-KTP di Indonesia

Latar Belakang Kasus: Kasus korupsi proyek KTP Elektronik (E-KTP) di Indonesia merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah pemberantasan korupsi di negara ini. Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dan bertujuan untuk mengganti sistem KTP manual dengan sistem elektronik guna meningkatkan akurasi data kependudukan dan mengurangi pemalsuan dokumen. Namun, proyek ini berujung pada penggelapan anggaran yang sangat besar.(Evi Fatmawati,2023).

Modus Operandi:

1. **Pengadaan Proyek yang Tidak Transparan:** Proyek E-KTP dikelola oleh Konsorsium Perusahaan yang dipimpin oleh PT. Gracia dan melibatkan beberapa perusahaan lainnya. Proses pengadaan tidak melalui tender terbuka, yang menyebabkan banyaknya potensi penyimpangan. Hanya beberapa perusahaan yang dipilih tanpa adanya transparansi.
2. **Mark-Up Anggaran:** Dalam pelaksanaan proyek, terjadi mark-up anggaran secara signifikan. Misalnya, harga pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak dibengkakkan hingga dua hingga tiga kali lipat dari harga pasar. Akibatnya, alokasi anggaran yang sangat besar (sekitar Rp 5,9 triliun) tidak digunakan secara efektif, dan sisanya disalahgunakan oleh para pihak tertentu.
3. **Suap dan Kolusi:** Terdapat banyak indikasi suap yang melibatkan pejabat pemerintah, termasuk anggota DPR. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyebutkan bahwa terdapat aliran dana suap untuk memuluskan proyek ini. Di antara nama-nama yang terlibat adalah Setya Novanto, mantan Ketua DPR, yang diduga menerima suap untuk memfasilitasi proyek E-KTP.

Pengungkapan Kasus: Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2017 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dan menangkap beberapa tersangka, termasuk Setya Novanto. Penyelidikan KPK membuka fakta bahwa banyak pejabat pemerintah dan legislatif terlibat dalam praktik korupsi ini. Selama persidangan, bukti-bukti yang menguatkan kolusi dan korupsi dikumpulkan, termasuk kesaksian dari sejumlah saksi.

Dampak Kasus: Kasus E-KTP memiliki dampak yang sangat luas, baik secara sosial maupun politik. Proyek ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Selain itu, banyak pihak yang merasa dirugikan karena penggunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik disalahgunakan. Dalam konteks hukum, kasus ini juga mendorong revisi beberapa regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Solusi dan Langkah-Langkah Pencegahan

1. **Reformasi Proses Pengadaan:** Reformasi yang mendalam dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Hal ini mencakup transparansi dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan .
2. **Penguatan Sistem Hukum:** Memperkuat sistem hukum yang ada, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar lebih tegas dan tidak memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman. Sanksi yang berat bagi pelaku korupsi juga perlu diterapkan untuk memberikan efek jera .
3. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang cukup mengenai bahaya korupsi dan dampak negatifnya. Menerapkan program-program edukasi di sekolah dan komunitas akan membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi .
4. **Penggunaan Teknologi untuk Transparansi:** Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan proyek publik akan meningkatkan transparansi. Sistem e-Government yang transparan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait anggaran dan pelaksanaan proyek, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi .
5. **Perlindungan Whistleblower:** Pentingnya menyediakan perlindungan bagi pelapor kasus korupsi tidak bisa diabaikan. Kebijakan yang memberikan keamanan kepada whistleblower

akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan.(Asep Sudrajat,2022).

Argumen Hukum

Upaya pencegahan korupsi perlu didukung oleh regulasi yang kuat dan implementasi hukum yang konsisten. Menurut Hasan (2019), partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran publik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam korupsi, terlepas dari jabatan atau status sosial mereka. Oleh karena itu, penguatan hukum dan kebijakan yang mendukung integritas dan transparansi sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.

Perbandingan langkah-langkah pencegahan korupsi

integritas serta transparansi di Indonesia dengan negara lain dapat memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa contoh negara yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani korupsi:

1) Singapura

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan anti-korupsi yang ketat melalui lembaga-lembaga seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

- **Penguatan Regulasi dan Hukum:** Singapura memiliki undang-undang yang sangat ketat mengenai korupsi, dengan sanksi berat bagi pelanggar.
- **Transparansi dalam Pengadaan:** Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka, dan informasi tentang proyek-proyek publik dapat diakses oleh masyarakat.
- **Pendidikan Anti-Korupsi:** Program-program pendidikan dan pelatihan mengenai etika dan integritas bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian penting dari strategi pencegahan korupsi.

2) Swedia

Swedia juga merupakan contoh negara dengan sistem anti-korupsi yang efektif. Di Swedia, transparansi dan partisipasi publik sangat dihargai. Beberapa langkah yang diambil meliputi:

- **Akses Terbuka pada Informasi Publik:** Hukum akses informasi di Swedia memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses dokumen dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah, memudahkan pengawasan.
- **Pengawasan yang Kuat:** Lembaga-lembaga independen seperti *Swedish National Audit Office* memainkan peran penting dalam memantau penggunaan anggaran publik dan mendeteksi penyalahgunaan.
- **Budaya Integritas:** Swedia mengedepankan nilai-nilai integritas dalam pendidikan dan di tempat kerja, yang membentuk masyarakat yang anti-korupsi.

3) Korea Selatan

Korea Selatan juga telah membuat kemajuan signifikan dalam memberantas korupsi. Setelah beberapa skandal besar, pemerintah Korea Selatan melakukan reformasi besar-besaran. Beberapa langkah yang diambil termasuk:

- **Penguatan Hukum Pemberantasan Korupsi:** Penerapan undang-undang yang lebih ketat untuk menindak pejabat publik dan anggota parlemen yang terlibat dalam praktik korupsi.
- **Teknologi untuk Transparansi:** Penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengawasi pengeluaran publik, serta memberikan platform bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- **Perlindungan Whistleblower:** Korea Selatan memiliki undang-undang yang melindungi pelapor korupsi, yang membantu mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan pembalasan.

4) Perbandingan dengan Indonesia

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah yang diambil dalam pencegahan korupsi masih menghadapi tantangan yang lebih besar. Meskipun Indonesia memiliki *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, regulasi dan penegakan hukum yang konsisten serta budaya integritas masih perlu diperkuat. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

- **Keterbatasan Akses Informasi:** Meskipun ada undang-undang yang menjamin akses informasi, implementasinya seringkali kurang efektif.
- **Budaya Korupsi yang Mengakar:** Keterbatasan pendidikan mengenai integritas dan etika di masyarakat masih menjadi penghalang untuk menciptakan budaya anti-korupsi.
- **Sanksi yang Lemah:** Sanksi bagi pelaku korupsi seringkali dianggap tidak cukup berat, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai.

Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif memerlukan pendekatan holistik, termasuk regulasi yang ketat, transparansi, pendidikan masyarakat, serta dukungan hukum yang kuat. Menerapkan praktik-praktik terbaik dari negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam membangun integritas dan transparansi di masyarakat, sehingga dapat mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. (Budi Setiawan, 2021).

REFORMASI HUKUM

Reformasi hukum di Indonesia telah menjadi agenda penting sejak berakhirnya Orde Baru pada akhir 1990-an. Reformasi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum, meningkatkan transparansi, dan memerangi korupsi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari reformasi hukum yang telah dan perlu dilaksanakan di Indonesia:

- **Perubahan Regulasi dan Undang-Undang**

Reformasi hukum dimulai dengan amandemen konstitusi dan penerapan berbagai undang-undang baru. Misalnya, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dalam memberantas korupsi.

- **Penguatan Lembaga Penegak Hukum**

Penguatan lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, dan Kejaksaan, sangat penting dalam reformasi hukum. KPK telah berperan aktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Namun, tantangan masih ada, termasuk intervensi politik dan upaya delegitimasi lembaga ini.

- **Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Reformasi hukum juga mencakup perlindungan HAM. Terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik penegakan hukum tidak melanggar hak asasi individu. Penegakan hukum yang adil dan transparan harus diperkuat, termasuk mekanisme pengaduan bagi korban pelanggaran HAM.

- **Pendidikan dan Kesadaran Hukum**

Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran hukum yang memadai. Program-program pendidikan hukum yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dapat membantu

mengurangi pelanggaran hukum dan meningkatkan integritas masyarakat dalam menghargai hukum.

- **Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Desentralisasi dalam pemerintahan daerah perlu didukung dengan peraturan yang jelas untuk mencegah korupsi di tingkat lokal. Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.

- **Partisipasi Masyarakat**

Reformasi hukum yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Mekanisme partisipatif seperti forum publik dan konsultasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum dan administrasi pemerintahan juga menjadi salah satu langkah penting. E-Government dan sistem informasi hukum yang transparan dapat membantu masyarakat mengakses informasi hukum dan mengawasi praktik pemerintahan.

Contoh dari Negara Lain

- Negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah menunjukkan keberhasilan dalam reformasi hukum yang efektif. Singapura, misalnya, menerapkan sistem anti-korupsi yang ketat dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi. Sementara itu, Korea Selatan melakukan reformasi hukum yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan.
- Reformasi hukum di Indonesia adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mendorong perubahan dan memastikan bahwa reformasi ini benar-benar menghasilkan sistem hukum yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

5. PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, berbagai regulasi hukum dan institusi telah dibentuk untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif. Meskipun sudah ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta lembaga seperti KPK, tantangan besar masih

menghadang dalam implementasi dan pengawasan terhadap tindakan korupsi. (E. Supriyadi,2023). Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, integritas dan transparansi harus ditanamkan sejak dini dalam pendidikan dan budaya Masyarakat. (A. M. Siregar ,2020).

SARAN

1. **Pendidikan Anti-Korupsi:** Sekolah-sekolah harus mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum untuk membentuk karakter dan etika generasi muda. Hal ini penting agar mereka memahami dampak buruk dari korupsi dan pentingnya kejujuran. Penelitian oleh Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa pendidikan anti-korupsi dapat mengurangi sikap toleran terhadap praktik korupsi di kalangan siswa.
2. **Kolaborasi Multi-Instansi:** Diperlukan kerja sama yang lebih baik antara KPK, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam setiap proses administrasi. Melalui pendekatan kolaboratif, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan layanan publik dapat lebih efektif.
3. **Peningkatan Akses Informasi:** Masyarakat harus diberikan akses yang lebih besar terhadap informasi publik untuk memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan penggunaan dana publik. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
4. **Penegakan Hukum yang Konsisten:** Penegakan hukum terhadap pelanggar korupsi harus dilakukan secara tegas dan adil. Sanksi yang lebih berat dan pengawasan yang ketat akan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
5. **Kampanye Kesadaran Publik:** Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Ini dapat menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat di masyarakat.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan pencegahan korupsi di Indonesia dapat lebih efektif dan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas. Implementasi regulasi hukum yang baik, diimbangi dengan partisipasi masyarakat, merupakan kunci untuk membangun Indonesia yang bebas dari korupsi .(Arif Sukanta,2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Evi. "Analisis Penyebab Korupsi di Sektor Publik: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2023): 34-49.
- Hasan, Zainudin. "Criminal Liability Offender Forgery of Sporadic Land Certificates at Bandar Lampung National Land Agency." *Ius Poenale*, vol. 4, no. 1, 2023.
- Hasan, Zainudin. "Korupsi dan Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, no. 1, 2022.
- Hasan, Zainudin. "Peran Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, vol. 3, no. 2, 2021.
- Setiawan, Budi. *Integritas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Siregar, A. M., "Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Upaya Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2020): 145-160.
- Sudrajat, Asep. "Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 9, no. 2 (2022): 102-120.
- Sukanta, Arif. *Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial*. Bandung: Rosda, 2022.
- Supriyadi, E., "Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2023): 22-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.